

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA PENDEKATAN ANALISIS SWOT DAN AHP

Lesmin Wonerengga¹⁾, Duha Awaluddin K²⁾, Petrus Bahtiar³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

^{2),3)} Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi
e-mail: lesmin123@gmail.com

ABSTRACT

Factors that influence the regional development of Puncak Jaya Regency, namely: strength factor: Puncak Jaya Regency as a mining area with Potential C Excavated Tax and Ground Water Source Assets. Weakness factor: Lack of efforts to socialize the potential of the Puncak Jaya Regency area to outsiders. The level of community participation in planning, implementing and supervising regional development is still lacking. Opportunitu factor: Various central and local government of Puncak Jaya Regency. Threat factors: ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Globalization, free market and world economic openness, lack of private investment in Puncak Jaya Regency. The priority strategies for regional development policies for Puncak Jaya Regency are based on consideration of potential, capabilities and existing constraints, namely: Alternative strategies include making the best possible use of financial support from the central government to maximize the potential that exists in the region. Maximizing the local tax sector and groundwater resource assets. The development policy priorities are: strengthening micro-economy, utilizing all resource to optimize regional autonomy, improving institutional performance.

Key words : SWOT and AHP Analysis Approach, Regional Development Policy Strategies,

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang provinsi baru di Papua memberikan keterangan bahwa ada beberapa daerah Otonomi Baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Didalam undang-undang tersebut juga diberikan penjelasan mengenai alasan mengapa Provinsi Papua dibagi kedalam beberapa wilayah baru yang mana penetapannya berdasarkan kawasan/daerah adat yang ada di Papua. Namun khusus untuk wilayah adat Tabi dan Sereri masih digabung atau menjadi satu dengan Provinsi indu yaitu Papua.

Pemekaran Provinsi Papua berdasarkan Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30 juni 2022 yang mana hasilnya adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Kota Wamena dan bersama dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Kemudian ada dua provinsi yang juga dimekarkan bersamaan yaitu Papua Selatan dan Papua Tengah. Provinsi Papua Pegunungan sebelumnya yang diusulkan adalah dengan nama Provinsi Papua Pegunungan Tengah namun yang disetujui atau disahkan adalah Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu provinsi ini merupakan satu-satunya provinsi di

Indonesia yang tidak berbatasan dengan perairan / lautan.

Lahirnya Undang-Undang Pemekaran Papua merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap Papua yang mana dengan adanya pemekaran ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, kemudian juga kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan dan juga menjadikan Papua semakin maju kedepannya. Amrullah, Taufiq. 2006 Asrari. 1986 Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kemampuan keuangan Daerah Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Daerah tingkat II Pandeglang. Universitas Indonesia; Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Selain Provinsi Papua Pegunungan ada daerah pemekaran lain yaitu Provinsi Papua Tengah yang mana ibukotanya adalah Kota Nabire. Wilayah pemerintahannya adalah Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Kabupaten Puncak.

Pada era saat modern saat ini memang tidak dapat dipungkiri fakta bahwa mekanisme pasar masih memegang peranan penting, akan tetapi kita tidak bisa serta-merta menyerahkan segala hal berkaitan dengan ekonomi ke mekanisme pasar. Brojonegoro PS, Bambang. 1992. AHP (the Analytical Hierarchy Process). Pusat Antar University - Studi Ekonomi Universitas Indonesia;

Disinilah pentingnya pemerintah yang hadir untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang ada dalam wilayah pemerintahannya dan juga hal penting lainnya adalah perencanaan pembangunan secara khusus di Wilayah Kabupaten Puncak jaya. Haruslah perencanaan pembangunan mempertimbangkan berbagai aspek demi kesejahteraan masyarakat. Idie, Marthen. 1999, Konsep Perencanaan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Pemantapan Otonomi Daerah di

Kecamatan Kaimana Kabupaten Fakfak. Universitas Indonesia;

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah sejatinya memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengupayakan semaksimal mungkin berbagai cara untuk kesejahteraan masyarakat yang mana dapat dilakukan dengan mengedepankan pelayanan public yang baik sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari setiap warga masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Menurut Susantono (2009) dan Sukimo, Sadono. 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta; ada beberapa masalah kesenjangan pembangunan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila tidak dikaji secara mendalam akan berdampak pada stabilitas pembangunan daerah dan juga secara nasional, beberapa permasalahan kesenjangan pembangunan diantaranya:

1. Kesenjangan antar wilayah dapat membuat standar hidup yang berbeda-beda antara daerah satu dan yang lain sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dari masyarakat oleh karena daerah atau wilayahnya kurang diuntungkan
2. Masalah Pengangguran menjadi hal yang juga perlu diperhatikan oleh karena daerah yang tidak seperti daerah lain yang memiliki SDA yang melimpah akan merasa dirugikan karena akan menjadi beban bagi Negara di wilayah tersebut.
3. Adanya biaya ekonomi yang tinggi untuk daerah atau wilayah yang tidak memiliki SDA yang banyak dibandingkan wilayah lain seperti di kota-kota yang mana akan

terjadi perkembangan yang lebih maju seperti infrastruktur dll.

Permasalahan kesenjangan pembangunan akan berdampak luas dan akhirnya akan terjadi permasalahan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pemerintah memegang peranan penting untuk mengatasi hal ini dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda tentu kebijakan yang dibuat harus memperhatikan karakteristik wilayah tersebut. Maka pemerintah harus kreatif melihat potensi yang ada dan menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan.

Menurut Todaro (2006) inti dari pembangunan adalah adanya peningkatan ketersediaan dan pendistribusian kebutuhan barang pokok, seperti sandang, pangan papan, kesehatan dan perlindungan keamanan bagi masyarakat. Kemudian juga pembangunan juga memiliki tujuan yaitu peningkatan standar hidup masyarakat seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan. Selain itu juga pembangunan memiliki tujuan adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan hal penting yang perlu dicapai demi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

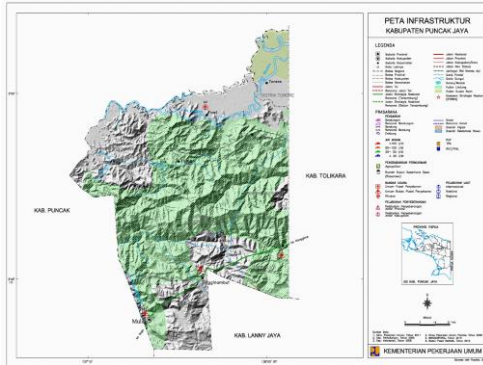
Berdasarkan data PDRB dan PAD Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Puncak Jaya selama 10 tahun masa otonomi daerah masih tergolong tertinggal. Padahal otonomi khusus memberikan hak secara penuh kepada daerah untuk dapat mengolah potensi yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Terbukti dari sisi pembangunan fisik dan juga keuangan maka Daerah Kabupaten Puncak Jaya masih tergolong tertinggal dibanding daerah lain seperti Kabupaten Jayawijaya, Mimika dan Lanny Jaya.

Secara teoritis PAD dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Dimana sektor yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi. Oleh karena dari dua sektor ini maka dapat dilihat seberapa mampu atau mandiri suatu daerah untuk dapat mengolah potensi yang dimiliki sehingga mendatangkan pendapatan bagi daerahnya. Dengan ukuran ini akan dapat menjadi indikator melihat keberhasilan daerah untuk memaksimalkan kebijakan otonomi daerah Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yaitu adanya hak atau kewenangan yang penuh bagi Kepala Daerah untuk dapat memanfaatkan segala potensi sumber keuangan yang dimiliki di daerahnya untuk meningkatkan PAD salah satunya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Haryanto, 2004).

Melihat fakta yang ada bahwa Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sampai saat ini belum mampu memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi sehingga pendapatan dari sektor tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Papua. Hal ini tidak sebanding dengan potensi SDA yang dimiliki wilayah Puncak Jaya sebagai sumber pertambangan pasir,, bahan galian golongan C dan sumber air tanah. Maka perlu ada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan sector pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan PDRB dan PAD karena masih terdapat beberapa sektor pendapatan daerah yang belum optimal dikelola untuk pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kabupaten Puncak Jaya, dimana penelitian dilakukan pada bulan Januari 2023



Gambar 1. Peta Infrastruktur Kab- Puncak Jaya
(Sumber : www.puncakjaya.go.id)

Penelitian ini menggunakan kombinasi analisis SWOT dengan metode AHP. Analisis SWOT dipilih karena analisis ini sangat bermanfaat dalam proses perencanaan strategi

Analisis dilakukan dengan melakukan analisis pada sisi faktor internal dan eksternal. Setelah diperoleh kategori factor internal dan eksternal maka dilakukan analisis dengan teknik analisis SWOT dan interaksi matriks IFAS-EFAS. Dengan teknik analisis tersebut maka diharapkan akan dapat diperoleh beberapa alternatif strategi yang sesuai dan juga menurut skala prioritasnya. Hasil beberapa alternatif strategi yang dihasilkan tersebut, kemudian dipilih skala yang menjadi prioritas kepentingan untuk diutamakan.

Selanjutnya peneliti memilih alternative strategi kebijakan yang dapat dipilih menjadi prioritas dengan menggunakan teknik atau analisis AHP. Kemudian hasil dari analisis AHP ini yang kemudian dapat dipilih menjadi alternative rekomendasi atau saran alternatif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Soesilo, I Nining. 2002. Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I. Universitas Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen, literature, serta informasi dari media kemudian juga penelitian langsung di Kabupaten Puncak Jaya maka diperoleh beberapa factor-fator internal dan eksternal dapat dilihat pada tabel 1. dan tabel 2. sebagai berikut :

Tabel 1. Perumusan Identifikasi Faktor Internal

No	Identifikasi Faktor Internal
1	Letak geografis Kab. Puncak Jaya
2	Keadaan topografi Kab. Puncak Jaya yang berbeda-beda
3	Kualitas & kuantitas SDM di Kab. Puncak Jaya
4	Ketersediaan Infrastruktur Dasar
5	Kab. Puncak Jaya daerah pertanian
6	Sarana, prasarana ekonomi diantaranya pasar dan lainnya di Kab. Puncak Jaya
7	Semangat kerja, dan jiwa wirausaha dari masyarakat di sektor perekonomian mikro
8	Kapasitas & kinerja kelembagaan di Kab, Puncak Jaya
9	Potensi SDA
10	Tingkat partisipasi masyarakat yg tinggi
11	Memiliki kewenangan menyusun peraturan perundangan demi optimalnya pengelolaan potensi daerah
12	Potensi Pariwisata
13	Pemerataan dari hasil pembangunan daerah
14	Upaya sosialisasi potensi Kab. Puncak Jaya kepada pihak swasta/investor.
15	Penentuan prioritas pembangunan
16	Sistem birokrasi di Kab. Puncak Jaya
17	PAD dan APBD Kab. Puncak Jaya

Tabel 2. Perumusan Identifikasi Faktor Eksternal

No	Identifikasi Faktor Internal
1	UU otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2	Undang-undang Pajak dan Retribusi;
3	Undang-undang tentang UMKM;
4	Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia;
5	Keadaan sosial, politik, dan ekonomi

6	internasional;
7	Keadaan sosial politik di tingkat nasional;
8	Keadaan sosial politik di Kab. Puncak Jaya;
9	Berbagai program pemerintah pusat;
10	Dukungan pemerintah pusat melalui dana transfer;
11	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;
12	Kemajuan tehnologi;
13	Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah;
14	Investasi swasta di lingkungan Kab. Puncak Jaya;
15	Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kab. Puncak Jaya

Melihat tabel diatas diperoleh hasil factor-faktor internal & eksternal tersebut yang digunakan untuk melakukan penelitian penilaian responden terkait factor tersebut yang mana terbagi kedalam 4 kategori yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Internal

No	Faktor Internal	Bobot	Kriteria
1	Pernyataan 1	7,5	S
2	Pernyataan 2	6,70	W
3	Pernyataan 3	7,55	S
4	Pernyataan 4	6,95	S
5	Pernyataan 5	7,90	S
6	Pernyataan 6	7,00	S
7	Pernyataan 7	7,35	S
8	Pernyataan 8	6,40	W
9	Pernyataan 9	7,00	S
10	Pernyataan 10	6,30	W
11	Pernyataan 11	6,55	W
12	Pernyataan 12	6,90	S
13	Pernyataan 13	6,60	W
14	Pernyataan 14	6,20	W
15	Pernyataan 15	6,40	W
16	Pernyataan 16	6,05	W
17	Pernyataan 17	6,00	W

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Tabel 4. Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Eksternal

No	Faktor Internal	Bobot	Kriteria
1	Pernyataan 1	6,60	O
2	Pernyataan 2	6,70	O
3	Pernyataan 3	6,95	O
4	Pernyataan 4	6,05	T
5	Pernyataan 5	5,40	T
6	Pernyataan 6	6,60	O
7	Pernyataan 7	6,30	T

8	Pernyataan 8	6,45	O
9	Pernyataan 9	6,85	O
10	Pernyataan 10	6,75	O
11	Pernyataan 11	6,25	T
12	Pernyataan 12	6,65	O
13	Pernyataan 13	6,40	T
14	Pernyataan 14	6,15	T
15	Pernyataan 15	6,45	O

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 2. dan 3. di atas terlihat bahwa hasil pembobotan factor internal dan esksternal relative berimbang, artinya selisih antara kedua factor tersebut sangat kecil dan secara keseluruhan berkisar antara 6 dan 7. Dapat disimpulkan bahwa apabila dilakukan penilaian ulang pada factor-faktor tersebut ada kemungkinan akan diperoleh hasil yang berbeda.

Berikut ini akan disajikan ringkasan factor-faktor internal dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Internal

Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata dari factor internal adalah 6,80. Penilaian tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu nilai rata-rata diatas nilai rata-rata total dikelompokkan menjadi factor kekuatan dan nilai rata-rata yang berada dibawah nilai rata-rata total diakategorikan kedalam kelompok kelemahan. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5. Pembobotan Faktor Internal (Kekuatan / Strength)

No	STRENGHT	RATA
1	Pernyataan 1	7,75
2	Pernyataan 3	7,55
3	Pernyataan 4	6,95
4	Pernyataan 5	7,90
5	Pernyataan 6	7,00
6	Pernyataan 7	7,35
7	Pernyataan 9	7,00
8	Pernyataan 12	6,90

Sumber : Data Primer, diolah 2023

No	WEAKNESS	RATA
1	Pernyataan 2	6,70
2	Pernyataan 8	6,40
3	Pernyataan 10	6,30
4	Pernyataan 11	6,55
5	Pernyataan 13	6,60
6	Pernyataan 14	6,20
7	Pernyataan 15	6,40
8	Pernyataan 16	6,05
9	Pernyataan 17	6,00

Sumber : Data Primer, diolah 2023

a. Faktor Kekuatan (Strenght)

Beberapa factor yang menjadi kekuatan dalam pembangunan Kab. Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

- 1) Posisi geografis Kab.Puncak Jaya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,75. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kekuatan yang dimiliki di Puncak Jaya adalah posisi geografisnya yang mana terletak di daerah dataran tinggi dan cocok untuk pertanian.
- 2) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,55. Artinya responden menyetujui bahwa Kualitas dan Kuantitas SDA menjadi salah satu factor kekuatan untuk peningkatan PDRB dan PAD Kab.Puncak jaya. Tentunya harus dikelola dengan baik sehingga dapat mendatangkan pendapatan yang maksimal bagi daerah.
- 3) Ketersediaan infrastruktur dasar mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,95. Artinya responden menyetujui bahwa ketersediaan infrastruktur di puncak jaya menjadi factor kekuatan dalam meningkatkan pembangunan di puncak jaya. Dengan adanya dukungan infrastruktur tersebut maka setiap program pemerintah akan dapat berjalan dengan baik.
- 4) Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah pertanian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,9. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kekuatan yang ada di puncak jaya adalah potensi pertanian. Oleh karenanya apabila sektor ini dapat dikelola dengan maksimal

tentunya akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat puncak jaya.

- 5) Sarana dan prasarana perekonomian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kekuatan yang ada di puncak jaya adalah saran dan prasarana yang sudah cukup lengkap seperti telah dibangun pasar dan juga tempat tempat jual beli lain yang mendukung penerimaan daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Namun pengelolaan yang tepat tentu akan dapat memaksimalkan potensi kekuatan dari factor ini.
- 6) Etos kerja, keuletan, dan jiwa wirausahaan masyarakat di sektor usaha kecil i mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,35. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kekuatan di puncak jaya adalah masyarakat punya semangat usaha yang tinggi, tidak mudah lelah, dan mau bekerja keras dalam mencari berkat. Sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan semangat yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat di puncak jaya yang demikian.
- 7) Potensi Sumber Daya Alam mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kekuatan yang ada di puncak jaya adalah SDA (Sumber Daya Alam). Hal ini memang tidak dapat dipungkiri oleh karena hasil – hasil tambang seperti pasir, galian c, dan sumber air

tanah melinah di daerah ini. Maka dari itu pemerintah harus cermat dalam mengelola kekayaan alam ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung setiap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah puncak jaya.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa factor kelemahan pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi topografi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya yaitu keadaan topografi atau iklim puncak jaya yang tidak menentu sehingga kadang menghambat proses-proses pekerjaan pembangunan dari pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya.
- 2) Kapasitas dan kinerja kelembagaan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya yaitu kelembagaan yang masih kurang tertata atau terstruktur. Yang mana kadang lembaga-lembaga antara yang satu dengan yang lain tidak saling sinkron atau mendukung dalam upaya pembangunan di puncak jaya.
- 3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah; mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,3. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya adalah partisipasi

masyarakat dalam pembangunan masih kurang. Hal ini oleh karena setiap kegiatan pembangunan terkadang tidak banyak melibatkan masyarakat. Yang terjadi adalah proyek-proyek pembangunan dikuasai oleh para pengusaha besar yang mana akhirnya pengusaha kecil tidak memperoleh bagian dan masyarakat akhirnya tidak ikut serta dalam pekerjaan tersebut

- 4) Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,55. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya. Oleh karena pemerintah daerah kurang memiliki kewenangan dalam penyusunan peraturan perundangan untuk memaksimalkan pengolahan potensi daerahnya. Akhirnya mereka selama ini hanya menerima peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait pengeloalan potensi daerah yang secara khusus seharusnya memiliki hak otonomi khusus dalam pengelolaan SDA yang dimiliki.
- 5) Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah; mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya karena hasil pembangunan yang sementara ini terus berjalan adalah puncak jaya kota, akhirnya hasil pembangunan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kota Puncak Jaya. Sementara di daerah

perkampungan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal akhirnay mereka merasa tersisihkan atau tidak diperdulikan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena adanya ketidak merataan pembangunan akan menimbulkan rasa ketidak puasan di tengah masyarakat yang mana menimbulkan banyak gejala konflik didalamnya.

- 6) Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten Puncak Jaya kepada pihak luar (swasta/investor); faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,2. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya adalah kurangnya kegiatan mensosialisasikan potensi yang ada di puncak jaya kepada pihak luar atau para investor. Sehingga pengelolaan SDA tidak maksimal karena kurangnya modal dan juga keahlian untuk mengolah kekayaan alam tersebut. Peran investor penting untuk dapat menjadi prioritas bagi pemerintah mendatangkan mereka sehingga dapat mengolah kekayaan yang ada dan tentu manfaat yang sebesarnya kepada masyarakat.
- 7) Penentuan skala prioritas pembangunan; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya adalah tidak adanya arah yang jelas tentang pembangunan yang sedang dijalankan. Akhirnya banyak daerah-daerah kampung di puncak jaya tidak mendapatkan atau merasakan bentuk

pembangunan dari pemerintah. Ini kelemahan yang menghawatirkan apabila tidak segera diatasi karena akan menimbulkan iri atau rasa tidak suka antar wilayah karena merasa tidak diperdulikan.

- 8) Sistem birokrasi di Kabupaten Puncak Jaya; faktor ini mendapat nilai rata-rata sebesar 6,05. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya adalah system birokrasi yang masih kurang baik. Atau pengaturan-pengaturan tertentu yang terkadang berlebihan sehingga menyulitkan seperti investor untuk datang. Kemudian surat menyurat dan hal-hal lain menyangkut kebutuhan dalam perekonomian.
- 9) Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD; faktor PAD dan struktur APBD Kabupaten Puncak Jaya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu kelemahan pembangunan di puncak jaya adalah struktur APBD yang tidak seimbang, yang mana pendapatan daerah masih rendah namun dalam anggarannya diporsikan amat besar untuk belanja pegawai. Semestinya anggaran yang diberikan alokasi tinggi adalah pembangunan sehingga dampaknya dapat terasa kepada masyarakat puncak jaya.

2. Faktor – Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata dari seluruh factor eksternal adalah 6,44. Penilaian tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu nilai rata-rata diatas nilai rata-rata total dikelompokkan menjadi factor kesempatan dan nilai rata-rata yang berada dibawah nilai rata-rata total diaktegorikan

kedalam kelompok ancaman. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 6. Ringkasan Pembobotan Faktor – Faktor Eksternal

No	OPPORTUNITY	RATA
1	Pernyataan 1	6,6
2	Pernyataan 2	6,7
3	Pernyataan 3	6,9
4	Pernyataan 6	6,6
5	Pernyataan 8	6,4
6	Pernyataan 9	6,8
7	Pernyataan 10	6,7
8	Pernyataan 12	6,6
9	Pernyataan 15	6,4
No	THREAT	RATA
4	Pernyataan 4	6,5
5	Pernyataan 5	5,4
7	Pernyataan 7	6,3
11	Pernyataan 11	6,2
13	Pernyataan 13	6,4
14	Pernyataan 14	6,1

Sumber : Data Primer, diolah 2023

a. Faktor Peluang (Opportunity)

Beberapa factor yang menjadi peluang pembangunan daerah Kab. Puncak Jaya sebagai berikut:

- 1) Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah adanya UU Otda dan perimbangan pusat dan daerah. Karena hal ini membuat adanya peluang pemerintah daerah puncak jaya memperoleh bantuan pendanaan terkait pembangunan yang dilakukan atau dikerjakan. Namun demikian tentu harus menjadi perhatian serius agar dana yang ada diberikan dari pusat dapat betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat puncak jaya.

- 2) Undang-undang Pajak dan Retribusi; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah UU Pajak dan Retribusi. Adanya peraturan perundangan ini membuat pemda puncak jaya menjadi leluasa dalam mengelola potensi sumber pendapatan daerah untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah. Maka dari itu setiap instansi yang bertanggung jawab terkait perpajakan tentu harus bekerja maksimal untuk dapat menggali setiap potensi pajak dan retribusi yang ada pada sektor-sektor ekonomi di puncak jaya dan tentu mendapatkan pendanaan yang maksimal untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah kab. Puncak jaya.
- 3) Undang-undang tentang UMKM, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,9. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah adanya UU UMKM. Ini peluang bagi masyarakat untuk dapat memaksimalkan kemampuan berwirausaha dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Karena pemerintah dapat terlibat aktif mendukung dan memfasilitasi masyarakat yang memiliki usaha skala mikro kecil dan menengah untuk terus mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan pengusaha lain di puncak jaya.
- 4) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah kondisi social politik dan ekonomi

internasional yang mana saat ini mengoptimalkan sisi perdagangan luar negeri. Ini peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi barang-barang local sehingga bisa menembus pasar luar negeri dan juga kondisi politik Indonesia yang saat ini tergolong kondusif tentu menjadi pendorong untuk pemda puncak jaya menjadi leluasa dalam menggali potensi ekonomi yang dapat mendatangkan pendapatan apabila dapat dikelola dan diperdagangkan secara meluas ke mancanegara.

- 5) Kondisi sosial politik di Kabupaten Puncak Jaya; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,45. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah kondisi social politik di puncak jaya. Karena iklim politik di puncak jaya saat ini terbilang kondusif sehingga peluang ini harus dimaksimalkan pemerintah untuk pembangunan yang seintensif mungkin sehingga mempercepat penyelesaian pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kab. Puncak jaya. Dan akhirnya dengan pembangunan yang merata maka masyarakat akan merasa diperhatikan dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat akan terjadi di puncak jaya.
- 6) Berbagai program pemerintah pusat, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,85. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah program-program pemerintah pusat yang mana saat ini sangat menjadi peluang pembangunan berkelanjutan di puncak jaya. Karena hal tersebut sejalan dengan anjuran pemerintah untuk segera melakukan pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun tentu harus memutuskan kerja keras dan kerjasama antar bagian didalam pemerintah puncak jaya untuk meraih target pembangunan tersebut.

- 7) Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,75. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu peluang pembangunan di puncak jaya adalah adanya dana transger dari pusat. Tentu adanya penambahan dana dari pemerintah membuat pemda puncak jaya memiliki anggaran yang besar untuk dapat mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan. Kemudian juga memiliki peluang untuk terus melakukan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten puncak jaya demi kesejahteraan masyarakat.

c. **Faktor Ancaman (*Threat*)**

Beberapa faktor yang menjadi Ancaman pembangunan daerah Kab. Puncak Jaya sebagai berikut:

- 1) Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,05. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu ancaman pembangunan di puncak jaya adalah globalisasi dan pasar bebas, hal ini tentu mengawatirkan oleh karena saat ini diakui pemerintah puncak jaya belum siap menghadapi pasar bebas dalam persaingan ekonomi dunia. Maka akan sulit bagi pemda puncak jaya untuk bersaing karena dalam skala local saat ini pemda masih kalah dengan pebisnis besar yang datang ke puncak jaya.

- 2) Perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China dan negara-negara ASEAN (ACFTA); nilai rata-rata sebesar 5,4. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu ancaman pembangunan di puncak jaya adalah perdagangan Indonesia dengan cina. Hal ini memang tidak terlalu berdampak serius bagi pemda puncak karena tidak terlibat langsung dalam kaitan perdagangan tersebut. Namun yang menjadi ancaman adalah adanya produk-produk cina yang nantinya bisa dimungkinkan akan banyak di puncak - puncak jaya dan akhirnya masyarakat local dan pebisnis local akan sulit bersaing dengan produk dari cina tersebut bila barang mereka sampai tiba di puncak jaya.
- 3) Kondisi sosial politik di tingkat nasional, faktor ini mendapatkan nilai rata- rata sebesar 6,3. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu ancaman pembangunan di puncak jaya adalah politik nasional di Indonesia yang terkadang mengalami pasang surut. Hal ini tentu menjadi kewaspadaan atau ancaman bagi pemda puncak untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menentukan target pembangunan agar tidak terganggu dengan adanya kondisi politik di Indonesia yang terkadang berubah – ubah secara mendadak.
- 4) Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Puncak Jaya, faktor ini mendapatkan nilai rata- rata sebesar 6,15. Artinya responden menyetujui bahwa salah satu ancaman pembangunan di puncak jaya adalah investasi swasta yang saat ini tergolong semakin meningkat di puncak jaya. Akhirnya para investor local tidak dapat bersaing dengan investor swasta pendatang baru yang banyak bermunculan. Ini

mempengaruhi ekonomi masyarakat secara menyeluruh jika tidak diatasi dengan baik oleh pemerintah kabupaten puncak jaya.

2. Pembobotan IFAS dan EFAS

Berikutnya setelah factor-faktor internal dan eksternal sudah dikelompokkan masing-masing menjadi dua kelompok yaitu factor internal menjadi kekuatan dan kelemahan, factor eksternal menjadi peluang dan ancaman. Maka langkah berikutnya adalah pembobotan IFAS-EFAS.

Berikut ini hasil penilaian bobot IFAS-EFAS dengan analisis SWOT khususnya pada Kekuatan (Strength).

Tabel 7. Penilaian bobot IFAS EFAS SWOT (strength)

	No	Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata-rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating	
STRENGTH	1	7.5	2.75	8.99	3.35	0.30	
	3	7.55	2.55	8.33	3.55	0.30	
	4	6.95	1.95	6.37	3.65	0.23	
	5	7.9	2.9	9.48	3.65	0.35	
	6	7	2	6.54	3.1	0.20	
	7	7.35	2.35	7.68	3.2	0.25	
	9	7	2	6.54	3.35	0.22	
	12	6.9	1.9	6.21	3.15	0.20	
		Total (Xsi)		18,4			2,04

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi dari factor kekuatan sebesar 7,9 yaitu Kab.Puncak Jaya sebagai daerah pertanian. Artinya sector pertanian dapat menjadi salah satu kekuatan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Walaupun beberapa waktu ini memang sector pertanian belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya. Akan tetapi setidaknya hasil ini memberikan gambaran dan harapan bahwa sector ini akan berkembang jika dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya.

Sektor ini biasa dikelola oleh masyarakat kalangan menengah kebawah, yang mana tentu dengan SDM yang dimiliki belum mampu untuk dapat memaksimalkan teknik-teknik pertaniannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka perlu perhatian dari pemerintah Kab. Puncak Jaya dalam hal ini bantuan-bantuan peralatan pertanian kepada para petani, kemudian pelatihan agar mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk dapat mengolah lahan menjadi hasil-hasil yang lebih maksimal untuk mendatangkan pendapatan bagi mereka. Dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berikut ini hasil penilaian bobot IFAS-EFAS dengan analisis SWOT khususnya pada Kelemahan (Weakness).

Tabel 8. Penilaian bobot IFAS EFAS SWOT (Weakness)

	No	Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata-rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating
WEAKNESS	2	6.7	1.7	5.56	3.35	0.19
	8	6.4	1.4	4.58	3.15	0.14
	10	6.3	1.3	4.25	3.05	0.13
	11	6.55	1.5	5.07	3.00	0.15
	13	6.6	1.6	5.23	3.20	0.17
	15	6.2	1.2	3.92	3.20	0.13
	16	6.4	1.4	4.58	3.20	0.15
	17	6.05	1.5	3.43	3.25	0.11
	18	6	1	3.27	3.45	0.11
		Total (Xsi)		12,2		

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata – rata terendah sebesar 6 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Kab. Puncak Jaya. Dapat diartikan bahwa responden menanggapi bahwa sisi belanja daerah menjadi hal yang disoroti oleh masyarakat seperti adanya pemborosan pada pembelanjaan belanja pegawai. Sementara dana yang dimiliki terbatas justru dialokasikan sebagian besar untuk belanja pegawai, sedangkan seharusnya dana yang ada dimaksimalkan untuk pembangunan di Kab. Puncak Jaya yang lebih menyentuh ke masyarakat.

Berikut ini hasil penilaian bobot IFAS-EFAS dengan analisis SWOT khususnya pada Peluang (Opportunity).

Tabel 9. Penilaian bobot IFAS EFAS SWOT (Opportunity)

	No	Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata-rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating
OPPORTUNITY	1	6.6	1.6	7.42	3	0.22
	2	6.7	1.7	7.89	3	0.24
	3	6.9	1.9	9.05	3.15	0.29
	6	6.6	1.6	7.42	2.8	0.21
	8	6.4	1.4	6.73	3.2	0.22
	9	6.8	1.8	12.33	3.05	0.38
	10	6.7	1.7	8.12	3.2	0.26
	12	6.6	1.6	7.66	2.85	0.22
	15	6.4	1.4	6.73	3.05	0.21
		Total (Xsi)		15		

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi dari factor peluang adalah sebesar 6,95 yaitu Undang-Undang tentang UMKM. Artinya responden menanggapi bahwa penting untuk dimaksimalkan adanya undang-undang ini. Oleh karena dapat membantu kalangan menengah ke bawah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu juga dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa ada beberap aspek yang harus diperhatikan untuk menumbuhkan iklim usaha di masyarakat yaitu dana, sarana prasarana, informasi usaha, kerjasama, isin usaha, promosi, dan dukungan dari lembaga – lembaga pemerintah pada usaha masyarakat. Hal ini tentu akan menjadi peluang bagi masyarakat yang mana tergolong usaha kecil dan menengah untuk dapat berkreasi dalam usahanya oleh karena da kepedulian dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuatkan untuk kesejahteraan usaha rakyat.

Berikut ini hasil penilaian bobot IFAS-EFAS dengan analisis SWOT khususnya pada Ancaman (Treat).

Tabel 10. Penilaian bobot IFAS EFAS SWOT

	No	Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata-rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating
THREAT	4	6.05	1.05	4.87	3.1	0.15
	5	5.4	0.4	1.86	2.85	0.05
	7	6.3	1.3	6.03	3	0.18
	11	6.25	1.25	5.80	3.1	0.18
	13	6.4	1.4	6.50	2.9	0.19
	14	6.15	1.15	5.34	3.45	0.18
		Total (Xsi)		6.55		

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata terendah pada factor ancaman adalah sebesar 5,4 yaitu adanya

kesepakatan dagang dengan Cina. Dari sisi pemerintah pusat tentu kesepakatan dagang ini akan menjadi menguntungkan untuk menarik pendapatan ke dalam negeri. Namun bagi daerah yang belum siap terhadap kebijakan pusat ini tentu akan memberatkan dan cenderung berbahaya atau menjadi ancaman. Karena seperti Kabupaten Puncak Jaya dalam bersaing dengan kesepakatan dagang tersebut belum memiliki sumber-sumber local yang dapat dijual atau diperdagangkan ke ranah luar negeri seperti dengan Cina tersebut. Maka tentu akan ada barang masuk ke daerah tapi tidak ada barang yang dijual keluar. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan terkhusus lebih ke daerah-daerah yang maju. Sehingga daerah yang masih tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya dapat mempersiapkan diri sebelum dapat bersaing dalam system perdagangan tersebut.

3. Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk dapat mengetahui prioritas strategi kebijakan pemerintah dengan berpatokan pada hasil pembobotan SWOT. Maka dilakukan kombinasi strategi internal dan eksternal kedalam matriks interaksi IFAS-EFAS SWOT yang mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Matriks Interaksi IFAS-EFAS SWOT

	IFAS	Strenght Bobot 2.04	Weakness Bobot 1.28
EFAS			
Opportunity Bobot 2,23		Bobot 4,27	Bobot 3,51
Threat Bobot 0,94		Bobot 2,98	Bobot 2.22

Sumber: Interaksi IFAS-EFAS, diolah 2023

Berdasarkan hasil perumusan matriks IFAS-EFAS dengan strategi SO,ST, WO dan WT maka dilakukan pembobotan nilai untuk menentukan skala prioritas yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten

Puncak Jaya dalam Pembangunan di wilayahnya. Beberapa hasil susunan strategi yang didapatkan dari pembobotan matriks interkasi SWOT adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Pembobotan Hasil Kuesioner SWOT

	S = 2,04	W = 1,28
O = 2,23	SO = 4,27	WO = 3,51
T = 0,94	ST = 2,98	WT = 2,22

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Susunan prioritas strategi yang tepat dalam pembangunan di Wilayah Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan hasil kombinasi strategi pembobotan matriks interaksi SWOT dari yang paling tinggi hingga sampai paling rendah adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	<i>Strenght-Opportunity (SO)</i>	4,27
II	<i>Wakness-Opportunity (WO)</i>	3,51
III	<i>Strenght-Threat (ST)</i>	2,98
IV	<i>Wakness-Threat (WT)</i>	2,22

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa interaksi IFAS-EFAS yang menghasilkan alternative strategi dengan bobot nilai paling tinggi adalah Strategi Strenght-Opportunity (SO).Dapat diartikan strategi yang tepat adalah memanfaatkan peluang menjadi kesempatan untuk pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya. kombinasi strategi SO dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 14. Strategi Prioritas I: Strategi *Strenght-Opportunitu (SO)*

Strategi SO (Strenght – Opportunity)
1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya seperti potensi sumber daya alam, serta

sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya;

2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Puncak Jaya, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Strategi SO menjadi prioritas untuk dapat menjadi alternative kebijakan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Akan tetapi meskipun dalam pembobotan beberapa aspek alternative strategi tersebut menjadi pilihan. Dalam pelaksanaannya tentu harus ada pilihan utama yang diterapkan terlebih dahulu dan secara simultan berangsur ke strategi yang lain. Sehingga akan tercapai kesinambungan penerapan kebijakan – kebijakan demi Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

PENUTUP

Pertama, Faktor-factor yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya yaitu : factor kekuatan : Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah pertambangan dengan Potensi Pajak Galian C dan Aset Sumber Air Tanah. Factor kelemahan : Kurangnya upaya sosialisasi potensi daerah Kabupaten Puncak Jaya kepada pihak luar. Tingkat partisipasi masyarakat pembangunan daerah yang masih kurang. Faktor peluang : Berbagai

program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya. Faktor ancaman : Globalisasi, pasar bebas, kurangnya investasi swasta di Kab. Puncak Jaya.

Kedua, Prioritas strategi-strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan pertimbangan potensi, kemampuan dan kendala yang ada yaitu : Alternatif Strategi diantaranya memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah pusat dengan sebaik mungkin untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Memaksimalkan sector pajak daerah dan asset sumber air tanah. Prioritas kebijakan pembangunan yaitu : memperkuat ekonomi kecil, mengolah potensi SDA yang ada, optimalkan OTDA dan OTSUS dan perbaikan kinerja lembaga di Puncak Jaya.

DAFTAR REFERENSI

- Amrullah, Taufiq. 2006. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. Universitas Indonesia.
- Asrari. 1986. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kemampuan keuangan Daerah Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Daerah tingkat II Pandeglang. Universitas Indonesia.
- Brojonegoro PS, Bambang. 1992. AHP (the Analytical Hierarchy Process). Pusat Antar University - Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Idie, Marthen. 1999, Konsep Perencanaan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Pemantapan Otonomi Daerah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Fakfak. Universitas Indonesia.

- Susantono, Bambang. 2009. Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Sukimo, Sadono. 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, I Nining. 2002. Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I. Universitas Indonesia.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.